

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang terdiri atas berbagai macam kepentingan, harus mampu memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders*. Hal ini dengan jelas menunjukkan betapa sulitnya sebuah perusahaan untuk memperahankan bisnisnya agar dapat terus bersaing di pasar. Memudahkan *stakeholders* untuk bertemu dan berinteraksi di pasar dalam menilai bagaimana kinerja perusahaan yaitu hal yang bisa dilakukan perusahaan agar bisa bertahan di pasar. Manajemen, konsumen, investor, kreditur, regulator, pesaing, dan pemangku kepentingan lainnya memerlukan data keuangan maupun non-keuangan yang akurat dan terkini tentang perusahaan di pasar. Laporan keuangan ialah alat komunikasi yang disajikan perusahaan yang berisi informasi keuangan perusahaan yang bisa dipakai oleh pelaku pasar.

Laporan keuangan perusahaan sangat berguna untuk *stakeholders*. Serta laporan keuangan adalah hal yang harus disediakan oleh perusahaan yang telah *go publik*. Di sisi lain, laporan keuangan belum mampu menggambarkan kondisi perusahaan dengan lengkap dan tepat sehingga dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan di antara pengguna laporan keuangan. Sehingga perlu dibuat pengungkapan sebagai informasi tambahan untuk dapat meyakinkan para pengguna laporan keuangan akan kondisi perusahaan.

Pengungkapan manajemen risiko adalah salah satu pengungkapan yang perlu dilakukan. Manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 adalah upaya dalam mengontrol aktivitas perusahaan terhadap risiko yang telah atau mungkin akan terjadi. Manajemen risiko dapat membantu perusahaan untuk mengurangi dan menangani dampak negatif yang muncul akibat risiko. Jika manajemen risiko dijalankan dengan baik, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang substansial, diantaranya kinerja perusahaan yang lebih baik, pelaporan risiko yang lebih transparan dan peningkatan keberhasilan bisnis. Perusahaan yang mempunyai tingkat kematangan manajemen risiko yang tinggi, ditafsir memiliki kemampuan yang baik dalam mengendalikan manajemen risikonya.

Pengungkapan manajemen risiko penting untuk dibuat dalam pelaporan perusahaan karena dapat memberikan gambaran terkait risiko yang dihadapi perusahaan dan bagaimana cara untuk menanganinya. Investor dapat mempertimbangkan aspek pengungkapan manajemen risiko ketika membuat keputusan investasi. Dikarenakan dengan adanya risiko yang diungkapkan, para investor akan mengevaluasi informasi tersebut serta mengetahui strategi manajemen risiko yang ada pada perusahaan. Yogi dan Chariri dalam (Saskara dan Budiasih 2018) menyatakan bahwa diungkapkannya manajemen risiko dalam laporan perusahaan dapat memperlihatkan perusahaan sudah berupaya untuk terbuka dalam mengkomunikasikan informasi kepada *stakeholders*.

Terdapat beberapa kasus yang pernah terjadi terkait dengan kegagalan perusahaan dalam mengelola risiko yang menyebabkan *stakeholders* kehilangan kepercayaannya akan informasi yang ada pada perusahaan. Seperti terdapat kasus kegagalan manajemen risiko pada tahun 2018 di PT Sariwangi Agriculture Estate Agency. Perusahaan tersebut dikatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena gagal dalam menganalisis dan mengelola risiko yang ada. Faktor utama yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan adalah kegagalan investasinya dalam upaya pengembangan produk. Seharusnya, PT Sariwangi Agriculture Estate Agency melakukan manajemen risiko sebagai upaya preventif dalam menghadapi risiko yang mengancam keberlangsungan perusahaan (Danang Sugianto, 2018).

Selain itu, terdapat juga kasus yang terjadi karena perusahaan tidak terbuka dalam pengungkapan risiko yaitu kantor akuntan publik Ernst & Young (EY) melakukan audit atas prediksi kecurangan yang dijalankan manajer sebelumnya dari PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang terjadi pada periode 2019. Piutang, persediaan, dan aktiva tetap Grup AISA dinilai terlalu tinggi senilai Rp 4 triliun, sedangkan penjualan dan EBITDA Entitas Makanan dinilai terlalu tinggi masing-masing bernilai Rp 662 miliar dan Rp 329 miliar. Ada dugaan aliran uang senilai Rp 1,78 triliun melalui berbagai skema AISA Group pada pihak-pihak yang diyakini memiliki hubungan dengan manajemen sebelumnya, terutama melalui pemanfaatan pinjaman AISA dari berbagai bank dan pembayaran deposito berjangka. Kurangnya pengungkapan kepada para *stakeholders* terkait hubungan transaksi dengan pihak berelasi mengakibatkan turunnya kepercayaan para *stakeholders* terhadap

pengungkapan laporan, dimana hal tersebut dapat dikatakan sebagai risiko reputasi. (CNBC Indonesia, 2019).

Pada tahun 2020, permasalahan pada aspek makro ekonomi Indonesia akan sangat terpengaruh, yaitu pada perbankan akibat Covid-19. Peristiwa besar ini disebabkan penyakit menular yang tidak dapat diharapkan oleh semua kalangan, bahkan para ahli di bidangnya. bidang risk management disclosure atau Chief Risk Officer (CRO) dalam Global Risks Report 2020. Covid-19 masuk dalam posisi ke-10 sebagai risiko yang memiliki pengaruh besar di dunia. Perusahaan yang telah menerapkan manajemen risiko sebelumnya harus telah melakukan kegiatan untuk mengidentifikasi jenis risiko dan bentuk manajemen risiko yang diterapkan. Dampak Covid-19 dapat diklasifikasikan ke dalam jenis pengungkapan manajemen risiko yang relevan. Risiko yang sangat terpengaruh adalah risiko operasional karena dapat mengganggu seluruh aspek kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasi bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini dan mengakibatkan 40% kantor cabang bank tutup sementara selama pandemi (Baines dan Hager, 2021).

Berdasarkan kasus- kasus tersebut di atas, bisa dilihat bahwa manajemen risiko pada perusahaan belum dikendalikan dengan baik sehingga bisa merugikan perusahaan serta kecurangan akuntansi yang terjadi pada kasus di atas menyebabkan menurunnya kepercayaan *stakeholders* terhadap perusahaan. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan perlu terbuka dalam menyampaikan informasi pada laporan tahunan perusahaan, dimana informasi yang dimaksud adalah pengungkapan manajemen risiko

karena pengungkapan informasi ini dapat berdampak pada pengambilan keputusan para investor dalam berinvestasi (Baredi Syaifurakhman, 2016 dalam Hakim dan Triyanto, 2019).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan perusahaan yang telah *go publik* harus memberikan informasi terkait aktivitas yang ada pada perusahaan dalam laporannya. Laporan tahunan perusahaan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi manajemen risiko. Informasi terkait risiko harus diungkapkan secara terbuka, yang berarti informasi yang disajikan mencakup informasi yang baik maupun yang buruk sehingga dapat mencegah terjadinya asimetri informasi.

Selain Otoritas Jasa Keuangan, terdapat regulasi lainnya di Indonesia yang mengatur pengungkapan manajemen risiko, yaitu PSAK No. 60 (Revisi 2010) dan Keputusan Ketua Bapepam- LK Nomor KEP-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa perusahaan diharuskan agar menyediakan informasi terkait risiko-risiko yang bisa berdampak pada kelangsungan usaha dan tindakan yang sudah dijalankan perusahaan dalam mengendalikan risiko tersebut. Berdasarkan regulasi tersebut, semua perusahaan non-keuangan diharuskan untuk memberikan informasi risiko dalam laporan tahunan mereka, namun luas minimum pengungkapan manajemen risiko tidak terdapat pada aturan tersebut.

Lain halnya dengan perusahaan keuangan yang diharuskan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan minimum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor

14/14/PBI/2012, yang menyatakan bank umum konvensional minimum wajib mengungkapkan delapan jenis risiko. Selain itu, perusahaan keuangan diharuskan untuk mengungkapkan keberadaan komite manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 mengenai Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Bagi perusahaan non- keuangan, pengungkapan keberadaan komite manajemen risiko sekedar himbauan karena tidak ada persyaratan bagi perusahaan non- keuangan untuk mengungkapkan keberadaan komite manajemen risiko. Sebab standar pengungkapan manajemen risiko untuk perusahaan non-keuangan lebih longgar mengakibatkan perusahaan kurang memperhatikan kelengkapan instrumen pengungkapan manajemen risiko (Wardhana dan Cahyonowati, 2013 dalam Saskara dan Budiasih, 2018). Oleh karenanya, terjadi keberagaman dalam luasnya pengungkapan manajemen risiko pada perusahaan non- keuangan.

Terdapat beberapa variabel yang diindikasikan mampu mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Kepemilikan publik ialah indikator pertama yang ingin diteliti. Pengungkapan manajemen risiko diduga dipengaruhi oleh kepemilikan publik. Kepemilikan publik ialah saham perusahaan yang dimiliki publik. Karena adanya perbedaan pada proporsi saham yang dimiliki pemilik saham publik, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kelengkapan informasi perusahaan (Swarte et al, 2019). Pengungkapan manajemen risiko akan kian meluas seiring dengan tingginya tingkat kepemilikan publik. Hal ini selaras dengan temuan Swarte et al. (2019) dan Adnyana

dan Adwishanti (2020) yang membuktikan kepemilikan publik memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun temuan oleh Hakim dan Triyanto (2019), Majid dan Nurbaiti (2021), Tarantika dan Solikhah (2019), Suwaldiman dan Fajrina (2022) dan Nugroho dan Pramesti (2021) membuktikan kepemilikan publik tidak mampu memengaruhi pengungkapan manajemen risiko.

Indikator kedua ialah ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris menurut Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 ialah badan usaha publik yang berperan menjalankan pengawasan umum dan/ atau khusus dan juga memberi nasihat terhadap Direksi selaras pada aturan perundang-undangan. Peran dewan komisaris ialah memantau praktik manajemen risiko dan memastikan perusahaan mempunyai strategi manajemen risiko yang kuat. Kemampuan untuk memantau dan mengungkapkan informasi akan meningkat apabila mempunyai jumlah anggota dewan komisaris yang lebih banyak, dan hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengungkapan manajemen risiko. Hal ini agar manajemen tidak dapat mengendalikan perusahaan sepenuhnya (Adnyana dan Adwishanti, 2020). Temuan oleh Hakim dan Triyanto (2019), Tarantika dan Solikhah (2019), Adnyana dan Adwishanti (2020) memperlihatkan ukuran dewan komisaris memiliki keterpengaruhannya positif dan signifikan pada pengungkapan manajemen risiko. Sementara itu temuan Saufanny dan Khomsatun (2017) dan Gustyana dan Putri (2022) membuktikan kalau ukuran dewan komisaris tidak dapat memengaruhi pengungkapan manajemen risiko.

Indikator ketiga ialah *leverage*. *Leverage* ialah rasio yang menggambarkan proporsi utang perusahaan (Sukamulja, 2019 : 92). Besarnya *leverage* menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan memiliki hutang yang lebih banyak daripada total ekuitas, sehingga perusahaan rentan terhadap masalah dalam pembayaran hutang dan bunga. Untuk memastikan bahwa perusahaan dapat membayar hutangnya tepat waktu, kreditur akan terus memantau situasi dan membuat permintaan informasi yang lebih spesifik tentang situasi keuangan perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan akan lebih mengungkapkan informasi yang lebih luas (Saskara dan Budiasih, 2018). Hasil penelitian Hakim dan Triyanto (2019), Saskara dan Budiasih (2018), Wardoyo dan Sinatrya (2022), Sarwono et al (2018), Majid dan Nurbaiti (2021) dan Tarantika dan Solikhah (2019) membuktikan *leverage* mempunyai pengaruh positif pada pengungkapan manajemen risiko. Tetapi berbeda dengan hasil temuan Sari et al (2021) dan Suwaldiman dan Fajrina (2022) yang membuktikan *leverage* tidak mampu memengaruhi pengungkapan manajemen risiko.

Indikator keempat ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ialah nilai yang mencerminkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan, yang dapat diamati berdasarkan total aset, penjualan serta nilai pasar. Banyaknya investor yang akan menanam modalnya kepada perusahaan akan diiringi dengan semakin besarnya perusahaan (Sarwono et al, 2018). Hal ini berpengaruh terhadap semakin luasnya pengungkapan manajemen risiko perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen pada investor (Syifa, 2013 dalam (Hakim dan Triyanto, 2019). Hal tersebut sesuai pada

temuan Sari et al (2021), Wardoyo et al (2022), Sarwono et al (2018), Tarantika dan Solikhah (2019), Suwaldiman dan Fajrina (2022), Adnyana dan Adwishanti (2020) beserta Larasati dan Asrori (2020) yang membuktikan ukuran perusahaan mampu mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Namun, temuan Hakim dan Triyanto (2019) yang membuktikan ukuran perusahaan tidak mampu memengaruhi pengungkapan manajemen risiko.

Indikator kelima ialah profitabilitas. Profitabilitas dipakai untuk melihat seberapa besar kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui kegiatan usahanya (Hery 2015). Kinerja perusahaan akan semakin baik seiring dengan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan. Perusahaan pada profit yang lebih besar lebih mungkin mengungkapkan lebih banyak informasi manajemen risiko dari pada perusahaan dengan tingkat keuntungan yang lebih rendah. Perusahaan pada tingkat profitabilitas yang besar dapat menyajikan lebih banyak informasi untuk mendapatkan kepercayaan *stakeholders*. Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat profitabilitas dapat menunjukkan baiknya usaha perusahaan dalam mengelola risiko. Hal ini selaras dengan temuan Saskara dan Budiasih (2018) dan Wardoyo et al (2022) yang menyatakan profitabilitas dapat mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Namun, hal tersebut tidak selaras dengan penelitian Sari et al (2021), Sarwono et al (2018), Majid dan Nurbaiti (2021), Suwaldiman dan Fajrina (2022) serta Adnyana dan Adwishanti (2020) yang membuktikan profitabilitas tidak mampu memengaruhi pengungkapan manajemen risiko.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Hakim dan Triyanto (2019). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, berikut perbedaan diantara keduanya.

1. Variabel bebas pada penelitian terdahulu terdiri atas kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, *leverage* serta ukuran perusahaan. Sementara penelitian ini menambah variabel profitabilitas.
2. Penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan yang tergolong pada indeks LQ45 di BEI sebagai populasinya, sementara penelitian ini memakai perusahaan manufaktur. Peneliti memakai perusahaan manufaktur sebab perusahaan tersebut adalah bidang usaha yang memegang kontribusi pendapatan terbanyak yaitu sebesar 17,33 persen yang merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan bidang usaha lainnya. Oleh karena itu, pengungkapan manajemen risiko harus diperhatikan secara lebih karena dapat mempengaruhi daya tarik investor.
3. Penelitian terdahulu memakai periode penelitian dari periode 2015 - 2017, sementara itu penelitian ini memakai tahun 2018 – 2021.

Berdasarkan penjelasan masalah dan terdapatnya *research gap* pada penelitian sebelumnya, peneliti ingin melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka berikut adalah masalah yang dapat diidentifikasi.

1. Terungkapnya kasus manipulasi laporan keuangan sebagai akibat dari kegagalan perusahaan dalam mengelola risiko, menyebabkan para *stakeholders* kehilangan kepercayaan terhadap pelaporan dan pengungkapan informasi perusahaan.
2. Karena regulasi pengungkapan manajemen risiko di perusahaan non- keuangan lebih longgar, perusahaan cenderung kurang memperhatikan kelengkapan instrument pengungkapan manajemen risiko, sehingga mengakibatkan keberagaman dalam pengungkapan manajemen risiko di perusahaan non- keuangan.
3. Apakah kepemilikan publik bisa memengaruhi pengungkapan manajemen risiko?
4. Apakah ukuran dewan komisaris dapat memengaruhi pengungkapan manajemen risiko?
5. Apakah *leverage* dapat memengaruhi pengungkapan manajemen risiko?
6. Apakah ukuran perusahaan dapat memengaruhi pengungkapan manajemen risiko?
7. Apakah profitabilitas dapat mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko?

8. Penelitian sebelumnya terkait keterpengaruhan kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas pada pengungkapan manajemen risiko menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada lima variabel bebas yang diindikasikan bisa memengaruhi pengungkapan manajemen risiko, diantaranya kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Populasi yang dipakai terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan di atas, berikut ini ialah rumusan masalahnya.

1. Apakah kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2021?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2021?

3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2021?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2021?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2021?
6. Apakah kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara bersama- sama berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan pengaruh kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2021.

2. Untuk membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2021.
3. Untuk membuktikan pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2021.
4. Untuk membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2021.
5. Untuk membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2021.
6. Untuk membuktikan pengaruh kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara simultan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018- 2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa menambah pengetahuan terkait pengungkapan manajemen risiko dengan indikator yang mempengaruhi yaitu kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan, serta profitabilitas.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini bisa berfungsi sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan pada topik yang sejenis yaitu pengaruh kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas pada pengungkapan manajemen risiko.

3. Bagi Investor

Penelitian ini bisa memberikan informasi pada para investor agar dapat mempertimbangkan kelengkapan pengungkapan manajemen risiko suatu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.